

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Analisis partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan kerangka lima tahapan partisipasi masyarakat menurut David Wilcox yang meliputi *information*, *consultation*, *deciding together*, *acting together*, dan *supporting community*. Kerangka tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi dinamika partisipasi masyarakat yang terjadi dalam konteks pembangunan kawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* telah berlangsung melalui beberapa tahapan partisipasi. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan menunjukkan tingkat yang berbeda. Pada beberapa tahapan masyarakat mulai dilibatkan melalui forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, bentuk partisipasi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keterlibatan masyarakat secara kolaboratif dalam proses pembangunan kawasan.

Pada tahap *information*, partisipasi masyarakat terlihat melalui kegiatan penyampaian informasi mengenai rencana pengembangan kawasan kepada masyarakat. Informasi tersebut umumnya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi

atau forum pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan, kebijakan relokasi, serta berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan kawasan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam tahap ini masih terbatas sebagai penerima informasi tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Tahap *consultation* menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terhadap rencana pembangunan kawasan. Dalam beberapa forum komunikasi masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kekhawatiran terkait pembangunan kawasan. Aspirasi masyarakat kemudian dihimpun oleh pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, masukan masyarakat belum sepenuhnya menentukan arah keputusan dalam pembangunan kawasan.

Pada tahap *deciding together*, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan bersama antara masyarakat dan pemerintah belum sepenuhnya terwujud. Forum yang melibatkan masyarakat lebih banyak berfungsi sebagai forum komunikasi atau diskusi. Proses musyawarah belum sepenuhnya menghasilkan keputusan bersama antara masyarakat dan pihak pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan pembangunan kawasan.

Tahap *acting together* juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan masih relatif terbatas. Pelaksanaan berbagai program pembangunan kawasan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah

dan pihak terkait lainnya. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses implementasi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program masih belum optimal.

Pada tahap *supporting community*, upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan juga belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Program yang diberikan kepada masyarakat masih lebih banyak berupa bantuan atau kompensasi tertentu. Sementara itu, kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya menjadi bagian utama dalam pembangunan kawasan.

Berdasarkan keseluruhan tahapan partisipasi tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang *Eco-City* dapat dikategorikan masih berada pada tingkat partisipasi awal. Bentuk partisipasi yang paling dominan terjadi pada tahap *information* dan *consultation*. Sementara itu, keterlibatan masyarakat pada tahap *deciding together*, *acting together*, dan *supporting community* masih belum berkembang secara optimal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan masih cenderung bersifat konsultatif.

Selain tingkat partisipasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang berasal dari kondisi masyarakat itu sendiri. Faktor internal tersebut meliputi kemauan masyarakat untuk

terlibat dalam pembangunan kawasan, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi pembangunan, serta kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai forum komunikasi. Ketiga faktor tersebut berperan penting dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan. Faktor eksternal tersebut meliputi campur tangan *stakeholder* dalam proses pembangunan, karakteristik sosial masyarakat seperti usia dan jenis kelamin, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti mata pencaharian dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor tersebut memengaruhi cara masyarakat memahami, merespons, dan terlibat dalam proses pembangunan kawasan.

Keterkaitan antara faktor internal dan eksternal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang saling berkaitan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menyediakan ruang partisipasi. Kondisi sosial masyarakat juga turut menentukan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan ruang partisipasi tersebut. Oleh karena itu, dinamika partisipasi masyarakat perlu dipahami sebagai proses yang kompleks.

Secara teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan proyek strategis nasional masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam praktiknya. Meskipun ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah tersedia, partisipasi

masyarakat masih cenderung berada pada tingkat informatif dan konsultatif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat perlu dikembangkan ke arah yang lebih kolaboratif, agar masyarakat dapat berperan sebagai subjek dalam proses pembangunan kawasan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yang difokuskan pada partisipasi yang hingga saat ini masih belum berfungsi secara optimal:

a. Tahapan *Information*

Tahapan informasi perlu diperkuat dengan memperbaiki cara penyampaian informasi agar lebih sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Pemerintah daerah, khususnya kelurahan/kawasan beserta perangkatnya, disarankan untuk:

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara rutin sejak tahap perencanaan pembangunan, tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan program;
- 2) Memanfaatkan beragam sarana komunikasi, seperti pertemuan tatap muka, papan pengumuman di lingkungan warga, serta media digital, misalnya grup *WhatsApp* warga dan akun media sosial resmi kelurahan;
- 3) Menetapkan aparat atau kader informasi di tingkat RT/RW yang bertanggung jawab menyampaikan sekaligus menjelaskan informasi terkait pembangunan secara langsung kepada masyarakat.

- 4) Pola penyampaian informasi yang telah berjalan, seperti sosialisasi formal melalui musyawarah kelurahan, tetap perlu dipertahankan. Namun, intensitas dan jangkauannya harus ditingkatkan agar informasi tidak hanya diterima oleh kelompok tertentu saja.

b. Tahapan *Consultation*

Pada tahap konsultasi, pemerintah perlu memastikan bahwa proses konsultasi tidak sebatas formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Menghidupkan kembali forum *rembug warga* di tingkat lingkungan untuk membahas rencana pembangunan secara lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi setempat;
- 2) Menyediakan posko, media, atau saluran pengaduan serta aspirasi yang mudah diakses, baik secara langsung maupun daring, sehingga masyarakat dapat menyampaikan masukan tanpa harus menunggu forum resmi;
- 3) Menjamin bahwa setiap hasil konsultasi dicatat, didokumentasikan, dan dapat diakses secara terbuka;
- 4) Apabila forum konsultasi sudah tersedia, ke depannya perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat, baik dari segi kehadiran maupun keberanian menyampaikan pendapat, agar konsultasi tidak hanya bersifat administratif.

c. Tahapan *Deciding Together*

Tahapan deciding together perlu diperkuat agar keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga berlanjut pada proses pengambilan keputusan. Pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menyusun mekanisme yang jelas mengenai cara masukan masyarakat dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan;
- 2) Menyampaikan hasil keputusan secara terbuka, termasuk penjelasan terkait usulan yang diterima, yang belum dapat diakomodasi, beserta alasan dan alternatif kebijakan yang dipilih;
- 3) Melibatkan perwakilan masyarakat dalam forum pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan program prioritas wilayah dan kebijakan yang berdampak langsung pada warga;
- 4) Jika selama ini masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah penetapan program, praktik tersebut perlu terus dilanjutkan agar tumbuh rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan.

d. Tahapan *Acting Together* dan *Supporting Community*

- 1) Memberikan dukungan konkret berupa pelatihan, pendampingan, serta bantuan permodalan bagi kegiatan ekonomi masyarakat, seperti UMKM melalui Koperasi Merah Putih Sembulang, Koperasi Produsen Transmigrasi Banon Tanah Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok

Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);

- 2) Mendorong pembentukan serta penguatan komunitas warga yang dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- 3) Mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi guna mendukung keberlanjutan komunitas dan aktivitas masyarakat;
- 4) Program pemberdayaan yang telah ada perlu terus dijalankan, dengan peningkatan pada aspek keberlanjutan, sehingga partisipasi masyarakat tidak bersifat sementara, melainkan berkembang menjadi keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan.